



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi Islam di Lahore pada tanggal 18 Pebruari hingga 24 Pebruari 1974.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945
2. Keputusan Presiden RI Nomor 23 /LN Tahun 1974.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir - pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Tingkat Tinggi Islam di Lahore pada tanggal 18 Pebruari hingga 24 Pebruari 1974.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan konperensi selama berlangsungnya konperensi tersebut

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada presiden.

KEEMPAT : Instruksi presiden ini berlaku selama Delegasi Republik Indonesia menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi Islam di Lahore, para tanggal 18 Pebruari hingga 24 pebruari 1974.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di jakarata

Pada tanggal 16 Pebruari 1974

PRESIDEN REPUBLIK LNDONESIA,

t t d.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN R.I.
NOMOR 2 TAHUN 1974.

PETUNJUK-PETUNJUK PENGARAHAN
BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
KE KONFERENSI TINGKAT TINGGI ISLAM
DI LAHORE

Keputusan Pemerintah untuk menerima undangan Presiden Bhutto dari Pakistan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Islam mengenai masalah Timur Tengah yang akan dilangsungkan di Lahore, Pakistan, dari tanggal 18 hingga 24 Pebruari 1974 adalah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah selama ini; dan sejalan dengan partisipasi aktif kita dalam "Islamic Conference" walaupun Indonesia bukan anggota Organisasi tersebut.

Berhalangannya Kepala Negara menghadiri KTT sama sekali bukan dimaksud mengurangi penghargaan yang tinggi dari Indonesia terhadap KTT dan apa yang ingin dicapainya. Lembaga-Lembaga Indonesia, dari MPR, DPR hingga kepada Pemerintah Indonesia dan wakil-wakilnya di Dewan Keamanan sudah selalu mengemukakan pendirian kita yang tidak perlu diragukan dan jelas tegas mengenai Timur Tengah.

Ikut sertanya Indonesia di KTT Lahore sejalan pula dengan keinginan kita yang besar untuk memberikan sumbangan yang positif dan konstruktif dalam usaha menciptakan dan mengembangkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa-bangsa, dengan sendirinya konferensi ini, dengan aktifitas-aktifitas Delegasi kita, akan membuktikan kepada para peserta dan dunia Islam akan solidaritas Pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap terhadap perjuangan negara-negara Arab. Saran-saran pemecahan masalah Timur Tengah yang akan dikemukakan Delegasi Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah kita kemukakan di forum-forum internasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Mengenai hal-hal yang mungkin dimusyawarahkan di KTT Lahore, maka pengarahan dan pegangan untuk Delegasi Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Persoalan Timur Tengah.

(a) Perkembangan hari-hari terakhir ini menunjukkan adanya keinginan dari semua pihak untuk mencari suatu penyelesaian yang diharapkan sesuai dengan aspirasi negara-negara Arab dan dunia Islam, dan yang akan membantu pembinaan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Konperensi Perdamaian di Geneva merupakan wadah yang disetujui bersama, dan kelihatannya mulai efektif untuk mencari penyelesaian yang menyeluruh itu.

Peleraian (disengagement) antara pasukan-pasukan Israel yang menduduki wilayah Arab dan pasukan-pasukan Mesir sedang dilaksanakan, dan diharapkan ini adalah langkah-langkah pertama bagi mundurnya pasukan Israel dari wilayah Arab. Yang mengembirakan adalah fakta bahwa sokongan dan solidaritas dunia internasional “terutama negara-negara Asia dan Afrika” untuk perjuangan Negara-negara Arab telah bertambah kuat dan nyata pula, singkatnya perjuangan Arab di medan diplomasi memberikan harapan-harapan yang wajar.

(b) Pemerintah Indonesia senantiasa menyokong perjuangan negara-negara Arab untuk mendapatkan kembali wilayah-wilayahnya yang di duduki Israel sebagai (*text tidak terbaca*) Bulan Juni 1979 untuk ini resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan lain-lain keputusan PBB perlu dilaksanakan sebaik-baiknya dan secara menyeluruh.

Dalam pada itu Pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya menerangkan bahwa konperensi-konperensi internasional, resolusi-resolusi pernyataan-pernyataan solidaritas hanyalah bahan-bahan pelengkap bagi perjoangan negara-negara Arab yang harus berdasarkan kesatuan dan kegigihan mereka sendiri.

(c) Perkembangan-perkembangan yang positif di hari-hari terakhir ini hendaklah terus ditingkatkan dengan menggunakan wadah Konperensi Perdamaian Geneva. Untuk ini



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KTT dapat menggalakkan usaha-usaha positif dari negara-negara Arab dalam dunia diplomasi bilateral dan multilateral sehingga Israel melaksanakan Resolusi 242 dan lainnya. Menjadi kewajiban pula bagi negara-negara dan kekuatan-kekuatan lainnya untuk terus memelihara solidaritas dengan dunia Arab, dan terus rnenggalakkan persatuan dan kesatuan negara-negara Arab yang telah menunjukkan hasil-hasil dan bukti-bukti yang mengagumkan, serta penggalangan kerjasama yang rapat antara negara-regara Arab dan negara-negara Asia - Afrika, untuk merngatasi kesulitan-kesulitan dan nengembangkan usaha-usaha untuk kepentingan bersama .

2. Persoalan Baitul muqaddis (jerusalern).

(a) Bagaimana membebaskan kembali baitul muqaddis, yang menjadi pendorong utama dari berhimpunnya pemimpin-pemimpin negara-negara muslim di Rabat dalam tahun 1969. Tidak banyak terdengar belakangan ini. Masalah ini memang tidak lepas dari soal Timur Tengah seluruhnya. Persoalan kota tua jerusalem ini bertambah sulit karena ia sekarang dijadikan sebagian dari ibukota Israel sehingga akan dipertaruhkannya sebagai soal “prestige” Israel sendiri, yang apabila demikian, jelas akan merupakan suatu pertarungan yang dapat menggawatkan. Tetapi disamping itu, Baitul muqaddis yang menjadi soal “prestige” bagi kaum muslimin sedunia.

(b) Sesuai dengan prinsip yang dianutnya, yaitu tidak membenarkan pencaplokan suatu wilayah melalui kekerasan, dengan sendirinya Pemerintah Indonesia menginginkan kota tua Jerusalem, di mana terletak rumah-rumah suci islam, dikembalikan kepada dunia Arab. Paling sedikit suatu penyelesaian harus dicari yang menjamin rumah-rumah suci islam itu dikuasai dan diurus sendiri oleh kaum muslimin, Dalam pada itu dunia Islam hendaklah mengadakan pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin agama lain, seperti kristen untuk memikirkan penyelesaian yaag terbaik, sesuai kewibawaan dari masing-masing golongan agama yang mempunyai tempat-tempat suci di Jerusalem.

3. “Islamic Development Bank” (mungkin dibicarakan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(a) Setelah terkatung-katung lebih dari dua tahun, akhirnya "Islamic Conference" Bulan Desember 1973 telah mengambil keputusan untuk mendirikan "Islamic Development Bank", dan panitia penyusunan peraturan-peraturannya sudah didirikan dengan diketuai oleh Tengku Abdurahman dari Malaysia, janji-janji modal lebih dari satu milyar dollar telah diperoleh dari negara-negara Arab penghasil minyak, Diperkirakan dalam tahun 1974 "Development Bank" ini sudah akan terbentuk organisasinya.

(b) "Islamic Development Bank" dapat merupakan sarana dan modal yang membantu pembangunan negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, Ia merupakan sumber keuangan yang baru, yang diwaktu yang lewat kurang banyak digunakan untuk membantu negara-negara yang miskin, karena itu Indonesia menyambut baik gagasan ini. Diharapkan dana-dana bank ini bukan saja akan dijadikan bantuan langsung ("direct aid"), tetapi pula dapat digunakan untuk investasi dalam usaha bersama ("joint ventures"), dan menggalakkan investasi dari negara-negara Arab yang kaya dalam industrialisasi negara-negara berpenduduk muslim yang umumnya tidak punya modal sama sekali. Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan secara baik dan mendalam partisipasi dalam "Islamic Development Bank" ini, dalam rangka saling membantu.

4. "Science Foundation" (mungkin dibicarakan).

(a) Pemerintah Pakistan ingin KTT membahas gagasannya, yaitu pendirian suatu "Science Foundation" yang dapat memberi bantuan guru, dana, perpustakaan dan alat-alat kepada sekolah-sekolah di dunia Islam, agar dengan bantuan itu dapat ditingkatkan pengetahuan dan teknologi mereka. Untuk keperluan ini Pakistan mengharapkan dapat diadakan satu Yayasan ("Foundation") bermodal besar, sehingga dari hasilnya dapat diongkosi aktivitas-aktivitas "Science Foundation".

(b) Pada prinsipnya Pemerintah Indonesia dengan gembira dapat menyokong gagasan ini, yang sejalan dengan cita-cita modernisasi yang sekarang digerakkan oleh Pemerintah Indonesia di dalam negeri sendiri. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk menyokong



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

moderenisasi sekolah-sekolah agama dan pesantren-pesantren Indonesia dengan alat-alat dana dan lain-lainnya.

5. Lain-lain

selain soal-soal diatas, forum KTT secara formil ataupun informil dapat digunakan oleh Delegasi indonesia untuk :

(a) Menjelaskan perkembangan di Indonesia, terutama dalam rangka Pembangunan dan PELITA II, serta menerangkan kemungkinan kerjasama ekonomi antara negara-negara Arab dan Indonesia.

(b) Mengajak solidaritas negara-negara Arab dengan indonesia mengenai problema-problema yang dihadapi Indonesia dalam perjuangan internasional, antara lain soal Wawasan Nusantara.

(c) Dan Lain-lain hal yang dapat dimanfaatkan bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Jakarta, 16 Pebruari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO

JENDERAL TNI